



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI IRENE ASTUTI DWININGRUM
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 773373

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 7.410.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1064 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 7.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/100 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah Seluas 179 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 223.000.000

1. MOBIL, TERIOS MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, COROLA SEDAN Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, HONDA NC110D Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SMP SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, COROLLA 1800 AT Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 400.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 8.033.000.000



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.033.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.